

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pembangunan negara Indonesia. Komitmen pendidikan bangsa Indonesia, ditegaskan dalam konstitusi UUD'45 Pasal 31, untuk menjamin hak mendapatkan pendidikan tiap warganya. Landasan tersebut diterapkan dalam kebijakan pemerintah, salah satunya Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diluncurkan tahun 2005. Program BOS bertujuan untuk memberikan akses pendidikan seluas-luasnya bagi tiap lapisan masyarakat Indonesia, guna mewujudkan pendidikan yang berkeadilan dan bermutu [1].

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Dana dari pemerintah pusat yang didistribusikan melalui pemerintah daerah ke setiap sekolah melalui rekening sekolah untuk membantu kegiatan operasional sekolah dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun [2]. BOS atau bantuan operasional sekolah yang selanjutnya disebut BOSP atau bantuan operasional satuan pendidikan yaitu program yang difungsikan untuk memajukan kualitas pendidikan, meringankan beban masyarakat di sekitar terkait biaya pendidikan dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik di sekolah serta ikut berpartisipasi dalam program wajib belajar sembilan tahun [2], [3].

Dalam institusi pendidikan, setiap sekolah memiliki organisasi atau struktur manajemen administrasi sekolah. Salah satu diantaranya adalah manajemen administrasi keuangan sekolah. Manajemen administrasi keuangan sekolah merupakan suatu manajemen perencanaan dan pengelolaan di dalam sekolah yang berfungsi untuk mengelola aktivitas keuangan di dalam suatu sekolah secara efektif dan efisien[4]. Berkaitan dengan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), manajemen keuangan sekolah inilah yang menjadi pengelola Dana BOSP yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 120 tahun 2020 yang bertujuan untuk mengatur pedoman pengelolaan keuangan sebagai penunjang kegiatan pemberian dana bagi Satuan Pendidikan yang dirancang untuk mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini untuk mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan khususnya Dana BOSP dilakukan melalui aplikasi "Sistem Informasi

Akuntabilitas Pendidikan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan Bantuan Operasional Pendidikan” yang selanjutnya disebut ”SIAP-BOSP-BOP”[5].

PT. Tabel Data Informatika merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang digital dan komunikasi yang menyediakan berbagai layanan, yaitu diantaranya pengembangan perangkat lunak terintegrasi, pengembangan IT dalam konteks digital dan komunikasi, dan pelatihan dibidang multi-media dan digital. Perusahaan ini memiliki beberapa klien, salah satunya yaitu Bank DKI. Bank DKI atau Bank Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan bank milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Dalam hal ini, Bank DKI bekerja sama dengan PT. Tabel Data Informatika untuk membangun Sistem Akuntabilitas Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Pendidikan (SIAP BOSP-BOP) untuk mengelola transaksi atau Dana BOSP dan BOP yang terkoneksi secara *online* dengan sistem Bank DKI. Bagian yang dikerjakan dalam aplikasi SIAP BOSP-BOP mencakup pengembangan Menu Konfirmasi Dropping Dana BOSP, Menu BA Pemeriksaan Kas BOSP, dan Menu Batal Transfer SPJ BOSP.

1.2 Rumusan Masalah dan Solusi

Berdasarkan latar belakang di atas, didapatkan rumusan masalah dan solusi berikut:

1. Rumusan Masalah

Bagaimana cara membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di sektor pendidikan di Provinsi DKI Jakarta?

2. Solusi

Membuat sebuah aplikasi web Sistem Informasi Akuntabilitas Pendidikan (SIAP), yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna untuk membantu pemerintah mengelola keuangan sekolah secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

1.3 Tujuan

Membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta di sektor pendidikan di daerah DKI Jakarta dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan agar lebih efektif dan efisien.

1.4 Batasan Masalah

Berikut merupakan batasan masalah pada pengembangan Sistem Informasi Akuntabilitas Pendidikan (SIAP) di Provinsi DKI Jakarta.

1. Ruang lingkup sistem informasi akuntabilitas pendidikan ini yaitu Provinsi DKI Jakarta
2. Ruang lingkup pekerjaan terfokus pada Pengembangan Aplikasi SIAP BOSP, sementara Aplikasi SIAP BOP tidak dibahas secara mendalam.
3. Aplikasi SIAP ini digunakan oleh PK (Bendahara), PA (Kepala Sekolah), TU (Tata Usaha Sekolah), SUDIN (Suku Dinas), Administrator dan Administrator Dinas pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
4. Menu yang dikerjakan dalam pengembangan aplikasi SIAP BOSP mencakup Menu Konfirmasi Dropping Dana BOSP, Menu BA Pemeriksaan Kas BOSP, dan Menu Batal Transfer SPJ BOSP.

1.5 Penjadwalan Kerja

Jadwal pelaksanaan magang di PT. Tabel Data Informatika adalah dimulai dari hari senin hingga jumat, dengan waktu kerja mulai pukul 09:00 sampai dengan pukul 17:00. Setiap hari, terdapat sesi *Daily Standup* untuk melaporkan progres atau mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan atau sedang dikerjakan.

Tabel 1.1 Tabel Pelaksanaan Kerja

No	Deskripsi Kerja	Juli		Agustus				Sept				Okt				Nov				Des				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	<i>Onboarding & Kegiatan Bootcamp</i>																							
2	<i>Maintenance dan Pengembangan aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah)</i>																							
3	<i>Pengembangan aplikasi BKU BUD (Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah)</i>																							
4	<i>Pengembangan aplikasi SIAP BOSP (Sistem Informasi Akuntabilitas Pendidikan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan)</i>																							

Tabel 1.2 Tabel Pelaksanaan Kerja

No	Deskripsi Kerja	Januari				Februari				Maret				April				Mei				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengembangan aplikasi SIAP BOSP (Sistem Informasi Akuntabilitas Pendidikan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan)																					
2	Pengembangan dan <i>Maintenance</i> aplikasi SIABAH (Sistem Informasi Special Nisbah) modul Data dan Reporting																					
3	Pengembangan dan <i>Maintenance</i> aplikasi SIWASKAT (Sistem Informasi Pengawasan Melekat) modul Ref dan Checklist																					
4	Pengembangan dan <i>Maintenance</i> terkait retensi waktu pada aplikasi SDB (Safe Deposit Box)																					
5	Pengembangan dan <i>Maintenance</i> aplikasi Virtual Account																					
6	<i>Maintenance</i> aplikasi SIKP KUR (Sistem Informasi Kredit Program Kredit Usaha Rakyat)																					
7	<i>Maintenance</i> aplikasi Absensi Outsourcing																					
8	Pengembangan dan <i>Maintenance</i> tampilan antarmuka pada aplikasi SISUKA (Sistem Informasi Surat Masuk dan Keluar)																					

Pada Tabel 1.1 menunjukkan rincian kegiatan pelaksanaan kerja bulan Juli hingga bulan Desember 2023. Dimulai dari kegiatan *Onboarding* dan *Bootcamp* yang

dilaksanakan pada minggu ketiga dan keempat di bulan Juli hingga minggu pertama di bulan Agustus. Minggu kedua hingga keempat di bulan Agustus melakukan pekerjaan *Maintenance* dan pengembangan aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah). Minggu pertama di bulan september melakukan pekerjaan pengembangan aplikasi BKU BUD (Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah) hingga minggu pertama di bulan Oktober. Sementara itu, pengembangan aplikasi SIAP BOSP (Sistem Informasi Akuntabilitas Pendidikan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) dimulai dari minggu kedua hingga minggu pertama di bulan Januari.

Pada Tabel 1.2 menunjukkan rincian kegiatan pelaksanaan kerja bulan Januari hingga bulan Mei 2024. Pada minggu pertama bulan Januari pengembangan aplikasi SIAP BOSP masih dilakukan. Dilanjutkan dengan pengembangan dan *maintenance* aplikasi SIABAH modul Data dan Reporting pada minggu kedua bulan Januari hingga minggu keempat bulan Mei 2024. Pengembangan dan *Maintenance* aplikasi SIWASKAT modul Ref dan Checklist dimulai pada minggu keempat bulan Januari hingga minggu keempat bulan Mei 2024. Selanjutnya, pengembangan dan *maintenance* terkait retensi waktu pada aplikasi SDB dilakukan pada minggu kedua bulan Februari. Pada minggu ketiga bulan Februari dilakukan pengembangan dan *maintenance* pada aplikasi Virtual Account hingga minggu keempat di bulan April. Pada minggu pertama hingga minggu kedua bulan Mei 2024 dilakukan *kegiatan maintenance* aplikasi SIKP KUR (Sistem Informasi Kredit Program Kredit Usaha Rakyat). Minggu ketiga dan keempat bulan Mei dilakukan kegiatan *maintenance* pada aplikasi Absensi Outsourcing. Pengembangan dan *Maintenance* tampilan antarmuka pada aplikasi SISUKA dilakukan pada minggu terakhir di bulan Mei.